

Impelementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal oleh

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit

Rendy Syachrezi*), Rina Martini), Neny Marlina**)**

Email: rendyrezi@students.undip.ac.id

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas**

**Diponegoro Jl. Prof.H.Soedarto,SH Tembalang
Semarang, Kode Pos 1269 Telepon (024) 7465407**

Faksimile (024) 7465405

**Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email
fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Hadirnya program BPJS Ketenagakerjaan sebagai program jaminan sosial ketenakerjaan merupakan bentuk pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam rangka memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja baik itu tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal. Tentu sudah seharusnya program tersebut memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta manfaatnya tersebut dapat dirasakan secara merata. Tetapi, pada implementasinya di lapangan yaitu di Kota Semarang, manfaat terlaksananya program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan masih belum dapat dirasakan masyarakat secara merata. Pada prakteknya implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang sebagian besar masih terbatas pada pekerja sektor formal saja, padahal seharusnya pekerja sektor informal juga mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh manfaat dari adanya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Semarang Majapahit, dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III dengan variabel Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, belum dapat dilaksanakan secara merata terutama bagi kepesertaan kategori pekerja informal, hal tersebut dapat dilihat masih belum tercapainya target kepesertaan kategori pekerja informal. Masih belum tercapainya target tersebut karena masih rendahnya tingkat kesadaran pekerja informal terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam hal memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi pada implementasinya belum merata, masih terdapatnya kendala pada komunikasi serta sumberdaya anggaran baik itu dari segi jumlah anggaran yang kurang serta masih kurang transparannya implementor kebijakan dalam hal anggaran membuat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum berjalan dengan optimal.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar implementor dapat lebih meningkatkan komunikasi berupa sosialisasi terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta meningkatkan koordinasi antar BPJS Ketenagakerjaan dengan para stakeholder nya. Selain itu, tidak hanya intensitas sosialisasinya yang ditingkatkan tetapi

juga diperlukan inovasi baru dalam melakukan sosialisasi masyarakat agar pola pikir masyarakat dapat berubah sehingga sadar akan pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlu lebih transparannya implementor kebijakan terkait informasi soal anggaran. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal membuktikan terkait kurangnya sumberdaya anggaran karena peneliti tidak berhasil mendapatkan data detil kurangnya anggaran tersebut. Untuk penelitan kedepannya direkomendasikan untuk melakukan crosscheck terkait keterangan perihal kurangnya anggaran tersebut.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

The presence of the Employment BPJS program as an employment social security program is a form of public service and the government's responsibility to its people in order to provide protection for workers, both formal workers and informal workers. Of course, this program should have many benefits that can be felt by the community and these benefits can be felt evenly. However, in its implementation in the field, namely in the city of Semarang, the benefits of the implementation of the social security program organized by BPJS Ketenagakerjaan cannot be felt by the community equally. In practice, the implementation of the Employment BPJS social security program in Semarang City is still mostly limited to formal sector workers, even though informal sector workers should also have the same rights in obtaining benefits from the Employment BPJS social security program.

This study aims to analyze the implementation of the employment social security program implemented by the Semarang Majapahit branch of the Employment BPJS office, using the theory of Policy Implementation from George C. Edwards III with the variables Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, documentation.

The results of the study show that the implementation of the Semarang Majapahit Employment BPJS social security program has not been implemented evenly, especially for participation in the informal worker category. This target has not been achieved due to the low level of awareness of informal workers regarding the importance of participating in the employment social security program. The conclusion of this study is that the government has carried out its responsibilities in terms of providing employment social security programs, but the implementation has not been evenly distributed, there are still obstacles to communication and budgetary resources, both in terms of the insufficient amount of the budget and the lack of transparency in policy implementers in terms of the budget. making the implementation of the employment social security program still not running optimally.

Therefore, this study recommends that implementers can further improve communication in the form of outreach regarding the importance of participating in the employment social security program, as well as improve coordination between Employment BPJS and its stakeholders. In addition, not only the intensity of the socialization has increased, but also new innovations are needed in socializing the community so that people's mindsets can change so that they are aware of the importance of participating in the employment social security program. There needs to be more transparency in policy implementers regarding budget information. This research has limitations in terms of proving the lack of budgetary resources because researchers were unable to obtain detailed data on the lack of budget. For future research it is recommended to cross-check related information regarding the lack of budget.

Keywords: Social Security, Labor, Employment BPJS, Policy Implementation

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

***) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PENDAHULUAN

Kehadiran program jaminan sosial di suatu negara merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara tersebut dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakatnya. Selain itu, pembentukan sebuah program jaminan sosial disuatu negara juga merupakan bentuk dari implementasi konsep negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara kesejahteraan (welfare state) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan sejahteraan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial (Hadiyono, 2020).

Dalam upaya untuk mencapai Welfare State, tentu banyak hal yang perlu dilakukan oleh negara demi tercapainya dan terlaksananya konsep welfare state. Konsep welfare state ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggung-jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain

sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara welfare state mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial (Huda, 2009).

Selain dari upaya menerapkan konsep Welfare State, Program Jaminan sosial juga merupakan salah bentuk pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Program Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut, yaitu fungsi pelayanan dimana masyarakat berhak mendapatkan layanan mengakses program jaminan sosial tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa program jaminan sosial bagi masyarakat, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai program lainnya. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam rangka memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Indonesia sama halnya dengan negara berkembang lainnya, mengembangkan program

jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal, walaupun saat ini pekerja informal pun sudah mulai dapat merasakan manfaat adanya program jaminan sosial bagi pekerja.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan baik itu, Jamsostek maupun yang sudah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang dimana memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial yang diderita saat ada kecelakaan pada periode sedang kerja. Manfaat dari adanya perlindungan tersebut adalah perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program sebagai bukti kinerjanya, program tersebut mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4

(empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam berjalannya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan dibagi menjadi beberapa kategori. mulai dari Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Jasa Konstruksi Pekerja Migran Indonesia, dari beberapa kategori kepesertaan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pekerja formal dan pekerja informal.

Dalam hal kepesertaan ini salah satu kendala yang ditemukan dalam berjalannya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan adalah masih rendahnya angka kepesertaan pekerja informal jika dibandingkan persentasenya dengan kepesertaan pekerja formal. Padahal pekerja informal juga memiliki hak yang sama dalam menerima program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bukti tanggung jawab pemerintah terhadap semua masyarakat dalam memastikan semua masyarakat mendapatkan hak dan pelayanan yang sama dan merata.

Di Jawa Tengah, angka kepesertaan di sektor informal masih terbilang minim. Saat ini, jumlah pekerja informal secara keseluruhan di Jawa Tengah sebanyak 5.756.340 orang. Namun, total pekerja informal yang baru terlindungi oleh program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan tersebut hanya sekitar 482.386 orang saja. Dimana dari jumlah yang sudah terdaftar tersebut hanya sebesar 8,38 persen saja yang ikut serta (Joglojateng, 2022). Sedangkan di Semarang, total pekerja informal yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 59.000 orang saja (AntaraneWS, 2023). Angka tersebut jika dibandingkan dengan jumlah peserta informal yang terdaftar di Jawa Tengah cukup kecil.

Menurut data dari BPS Kota Semarang Jumlah tenaga kerja informal Kota Semarang sekitar 35,78 persen dari jumlah angkatan kerja di Kota Semarang yang jumlahnya sekitar 1.516.391 pekerja. Dari angka tersebut berarti terdapat sekitar 542 ribu pekerja informal yang ada di Kota Semarang dari 542 ribu pekerja informal tersebut jika dibandingkan dengan data jumlah pekerja informal yang aktif mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan terdapat sekitar 20.870 peserta pekerja informal yang aktif, yang mana hal

tersebut berarti hanya 3,85 persen tenaga kerja informal di Kota Semarang yang mengikuti program jaimanan sosial Ketenagakerjaan yang mana angka tersebut sangat rendah.

Kota Semarang sendiri memiliki dua kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yaitu cabang Semarang Pemuda dan Semarang Majapahit. Dari kedua kantor cabang tersebut, Kantor Cabang Pemuda memiliki cakupan wilayah domisili kepesertaan mayoritas hanya Kota Semarang saja. Sedangkan Kantor Cabang Majapahit memiliki cakupan persebaran wilayah domisili kepesertaan yang lebih besar dibandingkan cabang Semarang Pemuda, yaitu sebagian wilayah Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Purwodadi. Walaupun Kantor Cabang Majapahit memiliki wilayah persebaran yang lebih besar, tetapi hingga saat ini jumlah angka kepesertaan tenaga kerja informal yang sudah terdaftar belum dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu pada tahun 2022 target jumlah kepesertaan aktif golongan bukan penerima upah (BPU) sebesar 44.116 orang, sedangkan yang baru tercapai hanya sebesar 36.542 orang saja.

Dari permasalahan tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Semarang khususnya di Cabang Semarang Majapahit karena Kota Semarang sendiri merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah pekerja sektor formal maupun informal yang jumlahnya cukup besar, yang harus mendapat perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain karena permasalahan di atas, alasan lain peneliti memilih melakukan penelitian di cabang Semarang Majapahit adalah karena penelitian serupa sudah pernah dilakukan di Kantor Cabang Semarang Pemuda.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengulas, dan menganalisis mengenai implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di wilayah Kota Semarang serta kendala dalam Implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang.

KERANGKA TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu dengan saran-saran tertentu dalam urutan waktu tertentu (Sugono, 1994). Implementasi adalah suatu tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif maka kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Dengan demikian, jika ingin suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, namun juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Edward III dalam Abdul wahab juga mempunyai pandangan model implementasi kebijakan yakni

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2011: 97), komunikasi diartikan sebagai “sebuah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.” Informasi yang terkait dengan kebijakan publik perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan, hal tersebut agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa saja hal yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut kedepannya, sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat dicapai

sesuai target yang diharapkan.

2. Sumberdaya

Menurut Edward III, bahwa faktor sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya peralatan.

3. Disposisi

Merupakan interpersonal dari implementor seperti integritas, sikap demokratis dan komitmen yang dibentuk. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Merupakan struktur organisasi yang memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan pada implementasi kebijakan itu sendiri.

Teori Jaminan Sosial

Dalam buku (Soepomo, 1983), jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di

luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatan (*income social security*) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya.

Jaminan sosial sebagai bentuk pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya tentu memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Jaminan sosial hadir sebagai bukti bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan serta hak-hak yang masyarakatnya, termasuk memperoleh kesejahteraan. Saat ini, jaminan sosial tidak hanya hadir untuk mengakomodir hak-hak masyarakat umum saja, tetapi jaminan sosial juga hadir secara khusus dalam memenuhi hak-hak para pekerja/buruh melalui program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif dimana pendekatan penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan dilakukan dengan teknik pengumpulandata melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan bagaimana implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi

pekerja informal oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang, khususnya pada kantor cabang Semarang Majapahit. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, proses penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun penelitian ini dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit. Subjek dalam penelitian ini yang utama adalah BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang yang menangani pemberian jaminan sosial terhadap para tenaga kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang, serta masyarakat yang mengikuti dan belum mengikuti program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4 orang yang terdiri dari, 2 tenaga kerja informal peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 2 tenaga kerja informal yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit Bagi Pekerja Informal Kota Semarang

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, sesuai

dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu saat ini program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya sebatas melayani pekerja sektor formal saja, tetapi saat ini juga sudah mulai mencakup pekerja sektor informal juga walaupun jumlahnya masih jauh pesertanya masih jauh dibawah pekerja sektor formal.

Dalam berjalannya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan pada Kantor cabang Semarang Majapahit masih ditemukan beberapa kendala terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal, untuk melihat secara lebih jelas terkait bagaimana implementasi program jaminan sosial di kantor cabang Semarang Majapahit ini, maka diperlukan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III.

a. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan, proses penyaluran informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Serta komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan penerima manfaat kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran dari

kebijakan tersebut dapat dicapai sesuai target yang diharapkan. Dalam hal ini target yang diharapkan adalah penambahan peserta pekerja informal dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang telah coba ditempuh oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk menambah jumlah peserta pekerja informal adalah dengan cara melakukan sosialisasi. Dengan adanya kegiatan sosialisasi diharapkan dapat memberikan edukasi terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan angka kepesertaan ini dilakukan dengan beberapa cara baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun, dalam implementasinya menurut keterangan kepala bidang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara umum sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan jumlah kepesertaan pekerja sektor

informal masih dapat dikatakan kurang efektif. Hal tersebut karena upaya sosialisasi yang dilakukan selama ini belum dapat merubah pola pikir masyarakat terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan demi melindungi diri mereka dari resiko pekerjaan.

Masih kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan angka kepesertaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari belum mencapainya target jumlah kepesertaan yang ditargetkan. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut juga menunjukkan bahwa jika dilihat dari jumlah kepesertaan tenaga kerja informalnya, implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang belum berjalan dengan maksimal.

BPJS Ketenagakerjaan Semarang terus berupaya melakukan sosialisasi dengan rutin dengan harapan perlahan dapat mengedukasi masyarakat terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan adanya sosialisasi yang

telah dilakukan oleh masing-masing kantor cabang untuk meningkatkan jumlah kepesertaan, dan dinilai masih kurang efektif dalam berjalannya, terdapat juga upaya lanjutan untuk meningkatkan angka kepesertaan tersebut adalah dengan cara melakukan sejumlah kerjasama dengan kantor cabang lain untuk melakukan sosialisasi bersama serta bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

b. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III indikator sumberdaya juga memiliki peran yang penting dalam proses implementasi suatu kebijakan. Implementasi program jaminan ketenagakerjaan oleh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit dalam hal sumberdaya manusia mana sebagai pengelola kepesertaan, baik itu mengelola data kepesertaan ataupun menarik peserta sudah mencukupi, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kuantitas saat ini pengelola kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit ada 8 pegawai dan hal tersebut dinilai sudah cukup. Kepala Bidang SDM dan Umum

juga menjelaskan bahwa jumlah tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari sektor kepesertaan, karena banyaknya jumlah pegawai tersebut telah ditentukan melalui tolak ukur yang jelas.

Kualitas SDM memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerjanya dalam bidang kepesertaan nantinya yang akan bekerja untuk meningkatkan jumlah kepesertaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun dapat dikatakan bahwa kualitas SDM memiliki peranan yang cukup besar dalam hal peningkatan jumlah kepesertaan, tetapi untuk bidang kepesertaan tidak memiliki kualifikasi khusus dari segi disiplin ilmu, kecuali pada bidang lainnya seperti keuangan yang memerlukan kualifikasi disiplin ilmu tertentu. Namun, walaupun tidak terdapat kualifikasi khusus ataupun disiplin ilmu tertentu dalam memilih pegawai untuk bidang kepesertaan, tetapi terdapat sejumlah seleksi yang sangat ketat untuk melihat seberapa baik kualitas SDM tersebut, selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga rutin melakukan pelatihan untuk para pegawainya demi meningkatkan

dan menjaga kualitas kinerjanya.

Dalam berjalannya implementasi program jaminan sosial dalam BPJS Ketenagakerjaan pada kantor cabang Semarang Majaphit ditemukan bahwa anggaran yang diterima masih kurang, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penghambat jalannya implementasi program jaminan sosial. Karena dengan masih kurangnya anggaran, sosialisasi yang dilakukan masih terbatas jumlahnya. Selain itu, menjadi kendala dalam hal memaksimalkan upaya meningkatkan angka kepesertaan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Terkait anggaran, BPJS Ketenagakerjaan juga mendapat bantuan iuran oleh pemda melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2020 pasal 15 poin A.

Dalam meneliti, penulis mengalami keterbatasan dalam memperoleh data terkait jumlah anggaran yang kuat tersebut secara detail. Hal tersebut karena tidak adanya transparansi dari pihak implementor kebijakan terkait

detail rincian kekurangan anggarannya tersebut. Maka dari itu dari itu dapat disimpulkan bahwa masih kurang transparannya pihak implementor kebijakan dalam hal membrikan informasi kepada peneliti. Sedangkan untuk sumberdaya peralatan, untuk mengelola dan memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan telah memadai. Hal tersebut dapat dilihat dengan sudah tersedianya sarana dan prasarana yaitu peralatan kerja seperti laptop ataupun komputer. Ruang kerja yang cukup nyaman, serta infrastruktur teknologi yang baik dan juga dilengkapi dengan koneksi internet yang memadai.

c. Disposisi

Keberhasilan dalam suatu program juga sangat bergantung dari bagaimanan sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan tersebut. Disposisi yang baik juga dapat dilihat dari kinerja pegawai dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengikuti alur pengelolaan, baik itu pada saat mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ataupun pada saat melakukan klaim jaminan sosial. Kemudahan alur pendaftaran

tersebut dapat dilihat dari banyaknya cara yang dapat dilakukan ketika masyarakat ingin mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. cukup banyaknya cara dan cukup mudahnya dalam hal mendaftar program jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan kinerja pegawai BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pengelolaan cukup baik. Pengelolaan yang cukup baik tersebut juga tidak hanya dilihat dari pelayanan yang berupa kemudahan cara pendaftaran dan klaim saja, tetapi pengelolaan yang baik dalam BPJS Ketenagakerjaan juga dilihat dari bagaimana implementor kebijakan memberikan kemudahan kepada para masyarakat dalam menyampaikan kritik dan sarannya, serta cepat tanggapnya implementor kebijakan dalam mengelola kritik dan saran tersebut.

Adanya program jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan harus benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi pesertanya baik itu peserta yang berkategori pekerja sektor formal maupun sektor informal. Tentu program tersebut nantinya akan sangat bermanfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu manfaat dari mengikuti program tersebut telah dirasakan oleh salah satu pekerja sektor informal yang melakukan klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berjalannya implementasi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini walaupun dari segi disposisi para pegawainya sudah cukup baik, tetapi tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan masih bertindak skeptisnya masyarakat terhadap hadirnya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, menjadi hambatan yang sangat besar bagi implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang merata cakupannya bagi semua pekerja baik itu pekerja sektor formal maupun sektor informal.

d. Struktur Birokrasi

Dalam implementasinya, dapat dilihat bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa stakeholder yang berguna dalam mendukung jalannya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat berperan sebagai regulator atau pembuat kebijakan serta berperan

aktif dalam mendukung dan membantu jalannya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu perusahaan dan serikat pekerja juga mempunyai peran yang cukup penting jalannya program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan dan serikat pekerja selain berperan aktif sebagai peserta, perusahaan dan serikat pekerja juga didorong untuk senantiasa memberikan kritik dan saran kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam implementasi program jaminan sosial, baik bagi pekerja sektor formal maupun sektor informal. Dengan adanya kritik dan saran yang diberikan oleh perusahaan dan serikat pekerja maka akan mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus melakukan peningkatan pelayanan bagi peserta program jaminan sosial tersebut. Maka dari itu sangat penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan stakeholder demi kemajuan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

2. Kendala Dalam Implementasi Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Semarang

Kendala yang menjadi hambatan dalam implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sejumlah kendala tersebut membuat implementor kebijakan cukup kesulitan untuk mewujudkan jaminan sosial sebagai bentuk pelayanan publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya tentu memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Bagaimana ingin mewujudkan manfaat yang merata apabila masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait program ini dan juga tingkat kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial masih rendah. Belum lagi, masih terdapat kendala lain seperti anggaran serta belum memadainya infrastruktur di beberapa daerah yang terpencil. Hal tersebut semakin mempersulit upaya mewujudkan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat secara merata.

Jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan sebagai salah satu jalan keluar bagi pekerja sektor informal, untuk dapat memenuhi kebutuhannya apabila terjadi kecelakaan kerja, kematian, dan menginjak usia kerja atau pensiun, ataupun resiko pekerjaan

lainnya. Tetapi dalam implementasinya hal tersebut belum terealisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Banyaknya kendala berupa tingkat kesadaran masyarakat, tingkat edukasi masyarakat terhadap program tersebut, kurangnya anggaran dalam melakukan upaya sosialisasi, rendahnya tingkat kemampuan ekonomi para pekerja sektor informal masih menjadi kendala utama dalam perjalanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal yang nantinya berdampak terhadap akses dan pelayanan terutama bagi masyarakat miskin (Soewartoyo, 2013). Oleh karena itu, ikut sertanya peran pemerintah daerah yang lebih serius sangat dibutuhkan dikarenakan tidak menutup kemungkinan para pekerja informal tersebut merupakan tulang punggung dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit sebagai salah satu implementor kebijakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di Kota Semarang masih

belum dapat memaksimalkan berjalannya program tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari belum optimal berjalannya 4 indikator suatu implementasi kebijakman dapat dikatakan berhasil.

Pada indikator komunikasi, BPJS Ketenagakerjaan belum dapat menghadirkan sosialisasi yang efektif dalam rangka meningkatkan angka kepesertaan pekerja informal, hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya target jumlah kepesertaan, hal tersebut membuktikan komunikasi yang berupa sosialisasi tersebut belum berhasil merubah pola pikir masyarakat. Selain itu, komunikasi yang dibangun antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Ketenagakerjaan hanya sebatas kerjasama untuk pekerja formal, serta kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang hanya sebatas sosialisasi saja, tidak terdapat MoU tertulis, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum optimal.

Selanjutnya pada indikator sumberdaya, sumberdaya manusia dan peralatan terbukti sudah cukup baik, ditemukan kekurangan pada indikator anggaran saja, dimana disebutkan bahwa anggaran yang diterima masih kurang, tetapi tidak terdapat perincian terkait kurangnya anggaran tersebut, peneliti

tidak mendapatkan terkait data detail kekurangan anggaran tersebut yang mana hal tersebut menunjukkan masih kurangnya transparansi anggaran yang menunjukkan bahwa indikator sumberdaya anggaran masih belum berjalan optimal.

Pada indikator disposisi dan struktur birokrasi, sudah berjalan dengan baik ditunjukkan dengan sudah baiknya struktur birokrasinya serta disposisi yang dilakukan juga telah dilakukan dengan baik. Perlu adanya upaya lebih serius maupun berjalannya sinergi yang baik antara semua lembaga yang terkait untuk mendorong kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena tingkat kesadaran dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan masih sangat rendah. Masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa tidak membutuhkan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Namun jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis implementasi program jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Kota Semarang masih belum merata. Hal yang menjadi kendala utama dari implementasi program jaminan sosial ini adalah komunikasi antara para

implementor kebijakan dengan masyarakat, serta masih kurangnya sumberdaya anggaran yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan angka kepesertaan pekerja informal.

SARAN

1. Perlunya meningkatkan dan memaksimalkan lagi kegiatan sosialisasi terkait dengan pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan baik bagi pekerja sektor formal maupun sektor informal.
2. Perlunya inovasi dalam sosialisasi karena, sejauh ini sosialisasi yang dilakukan belum dapat merubah pola pikir masyarakat terkait pentingnya mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Perlu adanya peningkatan besaran anggaran demi memaksimalkan kembali implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di setiap cabang BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan, 1.

Bambang Sugono, 1994, "Hukum dan Kebijakan Publik", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 137

Miftachul Huda, 2009, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 73.

Triyono dan Soewartoyo, "Kendala Kepersertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Di Sektor Informal : Studi Kasus Di Kota Surabaya," Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3, No. 3 (2013), Hlm. 31.

Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1983, h. 136

Joglo Jateng.com. 2022. Baru 8,38 % Perkerja Informal di Jateng Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.
<https://joglojateng.com/2022/10/24/baru-838-perkerja-informal-di-jateng-terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan/>

Antara News. 2023. BPJAMSOSTEK Semarang Pemuda kampanyekan program lewat Ngobras.
<https://jateng.antaranews.com/berita/483183/bpjamsostek-semarang-pemuda->

[kampanyekan-
lewat-ngobras](#) [program-](#)